

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Barnett, Hilaire. *Constitutional & Administrative Law*, Eight Edition, Routledge, London and New York, 2011.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Agusmidah. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika & Kajian Teori*. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Khakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Wahab, Solihin Abdul. *Analisis Kebijakan Publik*, UMM Press, Malang, 2008.
- Abdussalam, HR. *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta 2008.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Edisi Revisi*. Cet. 4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Lubis, M. Solly. *Kebijakan Publik, Mandar Maju*, Bandung, 2007.
- Huda, Nimatul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Mamudji, Sri et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Kontjoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Fadjar, Mukhtie. *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang, 2004.

- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004.
- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur sawah, Jakarta, 2004.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Lubis, M. Solly. *Hukum Tata Negara*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Hadjon, Philipus M. dkk *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Hadjon, Philipus M. Tentang *Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1, Januari 1998.
- H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht* (Utrecht: *Uitgeverij Lemma BV*), 1995.
- Ningrum, Sumarprihati C, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia (HIPSMI), Jakarta, 2006.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Cet. 6. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Noor MS. Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 6, Jakarta: Intermasa: 1979.

B. Artikel, Jurnal Majalah

- Berita Naker, “Menkumham Tegaskan Isu Serbuan TKA China itu hoax”, <http://kemnaker.go.id/berita/beritanaker/menkumham-tegaskan-isu-serbuan-tka-china-itu-hoax>, (diakses 9 September 2018, 11.40 WIB).

Berita Naker, “Kapolri minta masyarakat tak khawatikan isu tka lagi”,
[http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/Kapolri minta masyarakat tak khawatikan isu tka lagi](http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/Kapolri_minta_masyarakat_tak_khawatikan_isu_tka_lagi), (diakses 9 September 2018, 11.45 WIB).

Data Kementerian Tenaga Kerja Tahun 2016 Tentang TKA
<http://kemnaker.go.id/berita/beritakemnaker/pemda-diharapkan>
[memberikanperhatian-yang-lebih-terhadap](#) pengawasan
ketenagakerjaan, (diakses 9 September 2018, 11.50 WIB).

Jazuli, Ahmad., Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, ‘*Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian*’, JIKH Vol. 12 No.1 Maret 2018, halaman 90.

Yuliasuti, Ari. (‘*Dampak Invetasi dan Tenaga Kerja Asing Terhadap Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Asal Indonesia*’), (Jurnal Ketenagakerjaan Vol.13 No. 1 Edisi Januari-Juni 2018), Puslitbang Ketenagakerjaan Jakarta.

Jazuli, Ahmad, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, (‘*Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian*’), JIKH Vol. 12 No.1 Maret 2018, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.89-105>.

Pasaribu, Ifransko. Tesis 2003, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Pemberantasan TP. Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembebanan Pembuktian dan Sanksi dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001, (Medan: Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007),

Nasution, Bismar. (‘*Metode Penelitian Hukum Tipologi Normative Dan Perbandingan Hukum*’), makalah disampaikan pada dialog interaktif

tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, (Medan, FH. USU, 18 Februari 2003).

Syahmar, *tenaga kerja asing diindonesia kebijakan dan implementasi*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/1427> , diakses pada 26 Februari 2019 11:06

Jumarsa, Asep. *Analisis Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*, [https://www.kennywiston.com/analisis_peraturan_presiden_no_20 Tahun 2018 tentang tenagakerja asing](https://www.kennywiston.com/analisis_peraturan_presiden_no_20_Tahun_2018_tentang_tenagakerja_asing), diakses pada 22 Maret 2019 pukul, 5.02 Wib

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan TKA serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

Peraturan Presiden 2018, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing.

Keputusan Menteria Nomor 73 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Pengawasan Tenaga Kerja Asing.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.70/PPTK/IV/2013 tentang Pedaoman Pendampingan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor PER.455/PPTKPKK/III/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan Penggunaan TKA.

Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor PER.1612/PPTKPKK/X/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor PER.455/PPTKPKK/III/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan Penggunaan TKA.

Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham tentang *Integrasi Data Melalui Sistem Online Pelayanan Tenaga Kerja Asing Dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian*, Nomor: B. 360/PPTKPKK/I/2019 dan Nomor: IMI-OT.01.01-0395.

